Komisioner Komnas HAM: Kekerasan Seksual 1998 Perlu Penyelesaian Hukum

NU Online · Rabu, 13 Mei 2026 | 19:00 WIB



Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab. (Foto: dok pribadi)

Depok, ***NU Online***
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab menjadi narasumber dalam kuliah umum bertema *Belajar dari Luka Bangsa: Kekerasan Seksual di Era Reformasi dan Kebangkitan Generasi Muda* di Auditorium Gedung I Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Amiruddin menyoroti kasus kekerasan seksual dalam peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebagai luka lama bangsa Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan secara hukum.

“Sebagian elite politik pada saat itu membantah adanya kekerasan seksual, namun Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengakui hal itu terjadi dan memerintahkan Menhankam/Pangab Wiranto membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim itu pada akhir masa kerjanya menyimpulkan bahwa peristiwa kekerasan seksual tersebut sungguh terjadi. Namun, kesimpulan TGPF tidak ditindaklanjuti secara hukum,” jelas Amir.

Baca Juga

Guru Besar UI Kritik Penyangkalan Negara terhadap Fakta Pemerkosaan Massal 1998

Ia menjelaskan bahwa pada 2003-2004, Komnas HAM melakukan penyelidikan dalam kerangka Undang-Undang Pengadilan HAM.

“Dalam penyelidikannya, disimpulkan bahwa dalam peristiwa Mei 1998 terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), sebuah konsep kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Amiruddin kemudian menyoroti belum adanya tindak lanjut negara terhadap hasil penyelidikan tersebut.

“Sayangnya, bagaimana peristiwa masa lalu ini dapat diselesaikan? Jaksa Agung sudah berganti berkali-kali, namun tidak ada yang mau menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, Komnas HAM telah menjalankan kewenangannya sesuai Undang-Undang Pengadilan HAM, termasuk berulang kali berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tetapi belum membuahkan tindak lanjut.

Baca Juga

Koalisi Siap Banding Usai PTUN Tolak Gugatan Terkait Pernyataan Fadli Zon soal Peristiwa Pemerkosaan Massal 1998

Amiruddin berharap ke depan ada langkah nyata untuk memperjelas penyelesaian kasus tersebut demi mengobati luka kolektif bangsa.

“Peristiwa ini menorehkan memori kolektif bangsa yang sampai hari ini belum terselesaikan. Bahkan ada seorang menteri yang menyangkal peristiwa ini. Hal itu terjadi karena pengadilan HAM atas kasus ini sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan,” katanya.

Menurutnya, melalui pengadilan HAM, bukti-bukti dapat diuji secara objektif, bukan sekadar diperdebatkan dalam wacana politik yang justru dapat memperpanjang trauma korban.

Baca Juga

Aktivis Desak Pembentukan Pengadilan HAM untuk Akui Pemerkosaan Massal 1998

Ia juga menyoroti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan korban tidak dapat diterima meski telah mendengar kesaksian korban.

Karena itu, Amiruddin mengajak masyarakat untuk terus mengingat tragedi tersebut bukan untuk memupuk dendam, melainkan menjadikannya pelajaran moral bagi bangsa.

“Peristiwa ini menjadi pelajaran bukan hanya untuk individu, tetapi juga bagi orang-orang yang sedang memegang kekuasaan agar kekuasaannya digunakan untuk mengatasi masalah masa lalu ini,” ujarnya.

Ia juga mendorong dukungan dari perguruan tinggi dan generasi muda terhadap kerja-kerja Komnas HAM.

“Kalangan muda perlu melihat ini, karena kalau kalian tidak mengambil sikap, ke depan

peristiwa ini dapat terulang dan bisa saja kalian yang akan menjadi korban," tutup Amiruddin.

Editor: **Patoni**

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Tags

Orde Baru

Terpopuler

1 Arab Saudi Bagikan 100 Paket Umroh Gratis, Begini Cara Daftarnya

2 Prabowo Usulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai Calon Wapres

3 Prabowo Serahkan Calon Wapres Pengganti Gibran kepada MPR

4 PBNU Jelaskan 7 Mekanisme Pemilihan 33 PCNU untuk Program Khidmah Umat

5 Khutbah Jumat: Jangan Menunggu Masa Tua untuk Bersungguh-sungguh Beribadah

6 Prabowo Sebut Sistem Politik dan Hukum Tetap Berjalan di Tengah Pergantian Wapres

Terkini

Lihat Semua

Nasional

Mukernas II MUI 2026 Tegaskan Transformasi Tata Kelola dan Metode Dakwah

Kamis, 26 November 2026 | 14:00 WIB

Nasional

Muhammad Fajrul Husain Tawarkan Kaderisasi Adaptif dan Inklusif untuk Masa Depan IPNU

Kamis, 26 November 2026 | 13:00 WIB

Nasional

Ahmad Robert Tawarkan Gagasan IPNU Sinergi, Dorong Kader Berdaya dan Berdampak

Kamis, 26 November 2026 | 11:00 WIB

Nasional

Panitia Ad Hoc MPR Usulkan Sidang Paripurna Dua Hari Berturut-turut untuk Pilih Wapres Baru

Kamis, 26 November 2026 | 10:30 WIB

Nasional

Muhammad Rafli Rifki Reza Tawarkan Gagasan IPNU Trendsetter, Bangun Ekosistem Pelajar Tangguh

Kamis, 26 November 2026 | 09:00 WIB